

SKRIPSI

**PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
DI KOTA MATARAM
(*VOTER'S PARTICIPATION ON THE 2019 PRESIDENTIAL AND VICE
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE MATARAM CITY*)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

Lalu Nanang Alwi
Nim. 21511A0079

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM



Disusun dan diajukan oleh:

Lalu Nanang Alwi
NIM.21511A0079

PROGRAM STUDI
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam siding skripsi

Mataram, 18 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui.

Ketua Program Studi

Studi Administrasi Publik


R. Ahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN.08222048901

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM



Disusun dan diajukan oleh

Lalu Nanang Alwi
NIM.21511A0079

PROGRAM STUDI
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **22 Agustus 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Ketua (.....)

2. Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902

Anggota I (.....)

3. Drs. H. Mustamin H. Idris, MS
NIP. 196412102005011003

Anggota II (.....)

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Lalu Nanang Alwi

Nim : 21511A0079

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lain).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 07 September 2019



LALU NANANG ALWI
NIM: 21511A0079

MOTTO

**Manusia Yang Terbaik Adalah Manusia Yang Bermanfaat
Bagi Sesamanya**

*Perkecillah, maka engkau akan tumbuh lebih besar dari pada dunia. Tiadakan
dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata*

(Maulana Jalaluddin Rumi)



PERSEMBAHAN

Dengan hati yang dipenuhi cinta dan ketulusan, ku persembahkan kepada kedua orang tua ku:

LALU JAFAR PUTRA

DAN

SITI AISAH

**SERTA KU DEDIKASIKAN UNTUK KEBERLANGSUNGAN ILMU
PENGETAHUAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat anugrahnya dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM”**.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya program studi Administrasi Publik sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

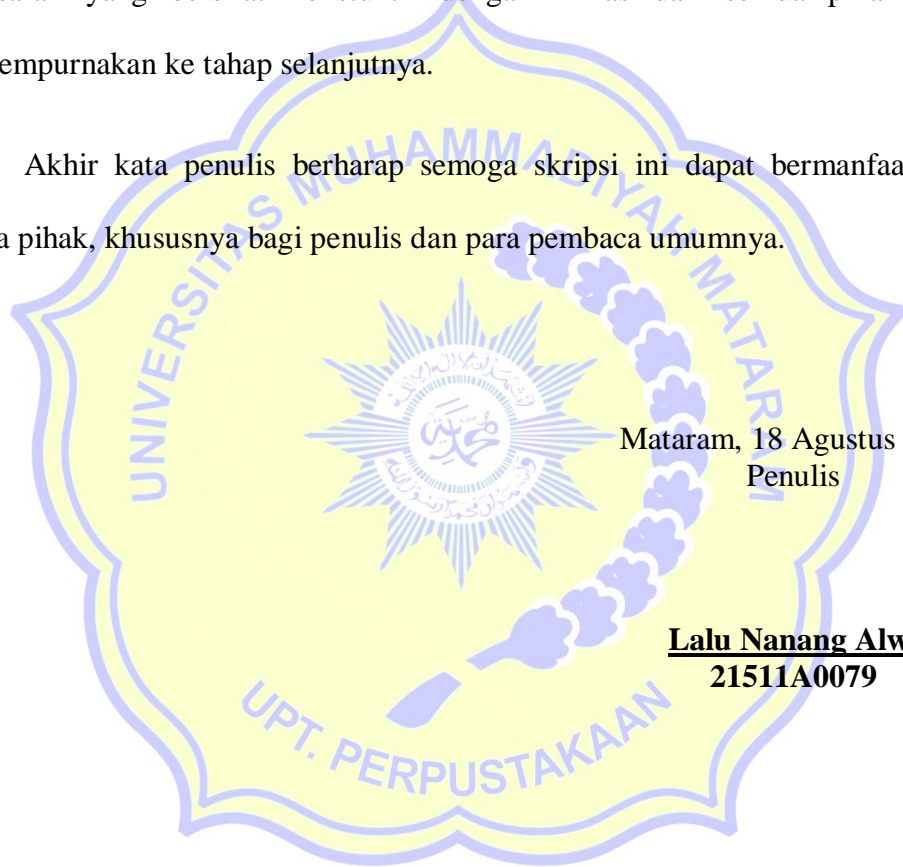
Dalam penyelesaian penulis skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberi dorongan bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Lalu Jafar Putra dan Siti Aisah
2. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.IP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Drs. Amil, M.M Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Mardiah, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus dosen pembimbing 1 yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP_Selaku Kaprodi Studi Administrasi Publik

7. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Semua Dosen yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga akhir.
9. Serta semua kawan-kawan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik bagi segi sisi maupun penulisan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dengan ihklas dari semua pihak demi menyempurnakan ke tahap selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.



Mataram, 18 Agustus 2019
Penulis

Lalu Nanang Alwi
21511A0079

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM

LALU NANANG ALWI

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilihan umum bukanlah tujuan, akan tetapi sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif dipusat dan daerah. Dalam pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang diselenggarakan diseluruh Indonesia, termasuk KPUD Kota Mataram yang telah mencatat jumlah DPT di Kota Mataram berjumlah 278.358.

Penelitian ini mengguakan teori budaya politik (Gaffar 2004), tipe budaya politik (Davies dan Lewis, 1971), partisipasi pemilih (McClosky dalam Miriam Budiardjo 2008), sebagai pisau analisa dan sebagai instrument peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Mataram.

Metodelogi penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis diskriptif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah partisipasi masyarakat Kota Mataram sampai pada angka 222.687 pemilih, dan melihat hasil dari penelitian antara model partisipasi pemilih aktif dan pemilih apatis, masyarakat kota Mataram termasuk kedalam pemilih berpatisipasi aktif dengan jumlah 60% sedangkan pemilih apatis berjumlah 40%.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih, Pemilih Aktif dan Pemilih Apatis.

***VOTER'S PARTICIPATION ON THE 2019 PRESIDENTIAL AND VICE
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE MATARAM CITY***

LALU NANANG ALWI

ABSTRACT

Elections are a means of democratic experience. It can be said that there is no democracy without elections. However, elections are not an objective, but as a means of electing parliamentarians and executive leaders at the central and regional levels. In the concurrent elections on 17 April 2019 which were held throughout Indonesia, including the Election Commission of Mataram City which had recorded the number of DPT in Mataram City amounted to 278,358.

This study uses political culture theory (Gaffar 2004), types of political culture (Davies and Lewis, 1971), voter participation (McClosky in Miriam Budiardjo 2008), as a knife for analysis and as an instrument for researchers to examine in depth about voter participation in presidential elections and vice president in 2019 in the city of Mataram.

The research methodology used is a qualitative approach with a descriptive analysis method. Descriptive analysis methods are used to get a systematic, factual, and accurate picture of the facts, the characteristics and the relationship between the phenomena under investigation.

The conclusion of this study is the number of people participating in Mataram City up to 222,687 voters, and looking at the results of research between active voter participation models and apathetic voters, the people of Mataram are included in active voters with 60% while apathetic voters are 40%.

Keywords: General Election, Voter Participation, Active Voters and Apathetic Voters.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PEREMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Manfaat	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan teori	11
2.2.1 Pemilihan Umum.....	11
2.2.2 Komisi Pemilihan Umum.....	18
2.2.3 Budaya Politik	22
2.2.4 Partisipasi Pemilih	24
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	28
2.4 Definisi Konseptual	28
2.5 Definisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Metode Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Sumber Data.....	30

3.4 Teknik Pemilihan Informan	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
4.1.1 Sejarah Kota Mataram	36
4.1.2 Geografi Kota Mataram	37
4.1.3 Pemerintahan Kota Mataram.....	37
4.1.4 Kecamatan Kota Mataram.....	38
4.1.5 Batas Wilayah Kota Mataram	40
4.1.6 Demografi.....	41
4.1.7 Keadaan Sosial Budaya	42
4.1.8 Keadaan Sosial Keagamaan	45
4.1.9 Pendidikan di Kota Mataram.....	46
4.2 Penyajian dan Analisis Data	47
4.2.1 Penyajian Data.....	47
4.2.2 Analisis Data	48
4.3 Model Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Mataram	51
4.3.1 Partisipasi Aktif	51
4.3.2 Partisipasi Apatis	56
4.3.3 Hasil Model Partisipasi	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Sumber Data Primer	30
Tabel 4.1 Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.....	38
Tabel 4.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram	38
Tabel 4.3 Batas Wilayah Kota Mataram	40
Tabel 4.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Mataram Tahun 2018.....	42
Tabel 4.5 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Mataram	49
Tabel 4.6 Jumlah DPT Kota Mataram Tahun 2019.....	50
Tabel 4.7 Model Partisipasi Pemilih Kota Mataram Berdasarkan Hasil Keseluruhan Wawancara.....	60



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum (berikutnya di singkat Pemilu) diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan, akan tetapi sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif dipusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi seperti halnya pemilu. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi faktor utama dan penentu suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu.

Sebuah pelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu. Pengguna hak suara sangat menentukan arah dan masa depan sebuah Negara yang menganut sebuah demokrasi, dimana seorang pemimpin merupakan perwujudan aspirasi masyarakat.

Pemilu tersebut mempunyai makna penting bagi berjalannya demokrasi, dimana setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih pemimpin pemerintahan. Harapan rakyat akan perbaikan negeri ini akan dapat terwujud apabila pemilu dapat menghasilkan pemimpin negara yang mempunyai kompetensi, kapasitas, aspiratif dan mempunyai komitmen dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu ikut serta mensukseskan agar mencapai hasil yang optimal. Menurut Andi Faisal (2016), Sebagai dari upaya konsolidasi demokrasi yang semakin kuat, maka perlu dicermati lima indikator pemilu yang berkualitas sebagai berikut :

Pertama, pemilu berkualitas menuntut penghapusan budaya politik transaksional atau money politik. Adanya transaksi seperti ini menyebabkan kualitas calon yang tidak dipertimbangkan pemilih sehingga pemilih terbiasa untuk memilih seorang calon berdasarkan harga atau berapa nominal yang didapatkan. Idealnya, masyarakat memilih berdasarkan penilaian yang obyektif sehingga calon tidak perlu mengeluarkan uang untuk meyakinkan pemilihnya, sehingga akan menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki legitimasi dan wibawa yang kuat.

Kedua, pemilu berkualitas membutuhkan perbaikan pendataan pemilih. Tingginya angka golput dalam pemilu, ternyata bukan hanya karena masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya. Namun kekacauan dan ketidakberesan dalam pendataan pemilih membuat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu pemilih walaupun mempunyai hak untuk memilih.

Ketiga, pemilu yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemilih. Harapannya, terhapusnya apatisme pemilih terhadap proses dan hasil pemilu karena dianggap pemilu hanya merupakan angka-angka pemenang dari pemilu ke pemilu, usai pemilu seringkali terabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal-hal ini tentu tidak baik karena apatisme masyarakat atas lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor penghambat bagi upaya konsolidasi demokrasi.

Keempat, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta yang tidak kalah penting independen. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelima, pemilu berkualitas mensyaratkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas jujur, adil, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Penyelenggara pemilu harus adil, yaitu adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Pemilu merupakan momentum bagi rakyat Indonesia untuk membuka lembaran baru sejarah demokrasi Indonesia. Demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun

juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti politisi, contoh kasus Muhammad Ali Akbar yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), karena melakukan money politic dengan bagi-bagi uang Rp 25.000.- (tribunwow.com,16/4/2019). Dengan adanya kasus seperti ini tentu akan mencoreng nilai dari demokrasi, yang tentunya dapat menyebabkan adanya kebiasaan dari pemberi dan penerima pasca adanya pemilu berikutnya. Kasus ini juga dapat menyebabkan terganggunya proses konsolidasi demokrasi yang semakin kuat dengan indikator yang disebutkan diatas.

Khusus di Kota Mataram sendiri, dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kota Mataram tercatat sebanyak 292.215 pemilih, DPT tambahan sebanyak 665 orang, Daftar Pemilih Khusus (DPK) 984 orang, dan DPK tambahan sebanyak 9.667 orang, sehingga total pemilih di Kota Mataram sebanyak 303.535 pemilih. Rapat pleno yang diselenggarakan di Hotel Lombok Garden, serta terperoleh 215.388 jumlah suara sah, sementara jumlah suara tidak sah 1.455 suara. Melihat jumlah ini, tingkat partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam pemilu presiden dan wakil prsiden tahun 2014 hanya 71 persen. (Kompas.com,17/07/2014).

Dalam pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang diselenggarakan diseluruh Indonesia, KPUD Kota Mataram mencatat jumlah DPT di Kota Mataram berjumlah 278.358 DPT. Pada pemilu serentak tahun 2019 ini KPUD

Kota Mataram mencatat jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten hingga 80% dari target Nasional 77%. (antaraNTB, 03/05/2019). Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti pemilu dari tahun 2014 hanya 71% menjadi 80% ditahun 2019.

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.

Menurut Miriam Budiardjo (2009), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya.

Tetapi perlu diingat bahwa, Pemilu merupakan wadah pergantian kekuasaan secara legal. Seperti pembahasan di atas, proses Pemilu merupakan proses yang sangat rentan terjadinya penggiringan opini oleh elit politik bahkan terjadinya politik uang. Fenomena yang terjadi menjelang pemilu mempengaruhi

berbagai model partisipasi masyarakat saat terlibat dalam pemungutan suara. Model partisipasi tersebut misalnya dapat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat termasuk struktur sosial serta kondisi ekonomi, isu agama, rasial dan opini publik.

Untuk mengetahui bagaimana model partisipasi pemilih di Kota Mataram dengan berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu rasanya untuk melakukan penelitian di Kota Mataram dengan judul **“PARTISIFASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti; Bagaimana Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Mataram?



1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Model Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Mataram?

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat di gunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu politik.
- b. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait model Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Mataram

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, jenis penelitian, metode penelitian dan temuan serta kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menemukan posisi penelitian tentang Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Wali Kota Mataram tahun 2015 di Kota Mataram.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Anizan, 2018	Starategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Kampar Tahun 2017	Strategi yang digunakan oleh KPU Kampar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan bupati Kampar tahun 2017, antaranya adalah Strategi penguatan yaitu salah satu cara atau metode yang dilakukan KPU Kampar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga menggunakan strategi rasionalisasi dengan menggunakan komunikasi tatp muka, sosialisasi komunikasi melalui media masa. Bukan hanya itu saja strategi yang digunakan KPU Kampar dalam meningkatkan partisipasi

			pemilih
2.	Petrus Gleko, 2015	Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.	Strategi KPU dalam hal ini di kabupaten malang dalam meningkatkan partisipasi politik dilihat dari tiga indikator. Pertama, formulasi dan sasaran jangka panjang. Kedua, tahap pemilihan tindakan, tahap ini KPU melaksanakan sosialisasi. Ketiga, tahap pengalokasian sumber daya, dengan meningkatkan sumber daya melalui bombing teknis kepada seluruh panitia <i>ad hoc</i>
3.	Dwi Haryono, 2016	Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015.	Strategi atau upaya dilakukan KPU kota samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2015. KPU menggunakan penguatan kelembagaan yaitu salah satu cara yang dilakukan KPU untuk memperkokoh atau memperkuat badan ataulembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan daripada penyelenggara dalam menungkatkan parti sipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan. Startegi sosialisai politik guna meningkatkan pastisipasi pemilih.
4.	Muhammad Wahyu Kuncoro,2018.	Media Sosial, Trust, dan Partisipasi politik Pada Pemilih Pemula.	Model yang menjelaskan bahwa variabel pengguna media sosial memiliki peranan terhadap partisipasi politik melalui variabel kepercayaan sebagai variabel

			mediator. sedangkan variabel kepercayaan memiliki peranan langsung terhadap partisipasi politik.
5.	Arie Putra, Christina Dwi Susanti, Indah Yusari, Ingrid Silitonga, Muhammad Hisbullah Amrie, 2018.	Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu, dan Jayapura.	Di butuhkan pendidikan mengenai HAM untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda di pekanbaru, Jakarta, Cirebon, palu, dan jayapura. Tidak hanya pengetahuan politik, namun pendidikan yang berisi penjelasan mengenai demokrasi dan penggunaan nilai-nilai HAM sehingga partisipasi politik yang dilakukan anak muda adalah partisipasi yang positif dan mendukung kebenaran publik.

Sumber : Jurnal-Jurnal dari tahun 2015-2018

Berdasarkan hasil penelitian pada table di atas, maka penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu. *Pertama* adalah skripsi dengan judul “Starategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Kampar Tahun 2017” oleh Anizan tahun 2018. Kesimpulan Strategi yang digunakan oleh KPU Kampar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan bupati Kampar tahun 2017, antaranya adalah Strategi penguatan yaitu salah satu cara atau metode yang dilakukan KPU Kampar untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga menggunakan strategi rasionalisasi dengan menggunakan komunikasi tatp muka, sosialisasi komunikasi melalui media masa. Bukan hanya itu saja strategi yang digunakan KPU Kampar dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah ”. Oleh Petrus Gleko tahun 2017. Kesimpulan Strategi KPU dalam hal ini di kabupaten malang dalam meningkatkan partisipasi politik dilihat dari tiga indikator. Pertama, formulasi dan sasaran jangka panjang. Kedua, tahap pemilihan tindakan, tahap ini KPU melaksanakan sosialisasi. Ketiga, tahap pengalokasian sumber daya, dengan meningkatkan sumber daya melalui bombing teknis kepada seluruh panitia *ad hoc*.

Peneliti berikutnya skripsi dengan judul ”Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015”. Oleh Dwi Haryono Tahun 2018. Kesimpulan Strategi atau upaya dilakukan KPU kota samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2015. KPU menggunakan penguatan kelembagaan yaitu salah satu cara yang dilakukan KPU untuk memperkuat atau mempeperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan daripada penyelenggara dalam menungkatkan partisipasi pemilih akan sesuai yang diinginkan. Strategi sosialisasi politik guna meningkatkan partisipasi pemilih.

2.2 Landasan teori

2.2.1 Pemilihan Umum

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Menurut Gaffar (2012:5) pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah

penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sedangkan menurut Efriza (2012:355) pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi bicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama, jadi pemerintahan demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Penyelenggara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Pengertian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan umum (pemilu) 2014 harus menjadi agenda bersama, demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Menciptakan pemilu yang berkualitas bukan hanya menjadi agenda Komisi Pemilihan Umum saja, namun seharusnya juga menjadi agenda partai dan masyarakat sipil. Harus ada sinergi antara penyelenggara pemilu yang jujur dan adil, partai politik yang berkualitas, serta pertautan publik yang kuat. Pencapaian pemilu 2014 yang berkualitas ini penting, karena melihat pemilu 2009 yang banyak memiliki catatan kurang memuaskan, bukan tidak mungkin, kegagalan pemilu di 2014 akan menimbulkan banyak dampak yang negatif di masyarakat.

Adapun indikator-indikator sebagai panduan agar pemilu berjalan secara berkualitas, Antara lain dengan dilaksanakannya pemilu tersebut oleh penyelenggara yang profesional, independen, dan kredibel. Independen artinya penyelenggara mampu menjaga jarak yang sama dengan berbagai aktor politik, baik yang sedang berkuasa maupun yang tidak. Selain itu, beberapa indikator yang lainnya adalah hak pilih bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, tingkat pemahaman politik masyarakat yang baik, partai dengan program yang kuat, kandidat dengan rekam jejak yang positif, peradilan pemilu yang cepat dan independen, konversi suara yang tepat, serta kompetisi yang fair.

Menurut Abdullah (2009) Pemilu berkualitas juga pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Dari sisi proses, pemilu dikatakan berkualitas jika berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Jika dilihat dari sisi hasil, pemilu yang berkualitas harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping itu dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia internasional, atau dengan kata lain didapatnya pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Ada tujuh alasan mengapa Pemilu yang berkualitas penting, yakni: Pertama, rakyat mengekspresikan kedaulatannya, dengan adanya pemilu, maka rakyat membuktikan bahwa kedaulatan bukan ditangan elit, melainkan di tangan mereka. Selain itu rakyat memiliki hak untuk memilih dalam setiap pemilu berlangsung. Kedua, warga menyatakan hak bebas berserikat, berkumpul dan memberikan suara. Melalui pemilu, rakyat dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD atau Presiden dan Wakil Presiden, yang menentukan anggota legislatif dan Presiden adalah rakyat. Artinya elit politik mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat lahir dan batin.

Ketiga, membentuk pemerintahan yang terlegitimasi, dengan adanya pemilu, dimana rakyat memilih langsung Presiden dan anggota DPR/DPRD/DPD,

maka akan terwujud pemerintahan berlegitimasi. Tanpa adanya Pemilu, maka akan terjadi pemerintahan yang otoriter atau monarhis. Keempat, pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai, dengan adanya pemilu, maka suksesi dapat dilakukan secara berkala dan sistematis. Melalui pemilu, kekuasaan eksekutif dan legislatif dibatasi, sehingga terhindar dari pemerintahan yang otoriter.

Kelima, melalui pemilu dapat dilakukan rekrutmen politik secara terbuka. Artinya melalui pemilu akan didapatkan kader-kader yang berkualitas yang akan dipilih oleh rakyat secara langsung, dengan adanya pemilu, rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat pun bisa mencalonkan diri untuk dipilih. Keenam, melalui pemilu konflik kepentingan yang ada di tingkat masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat. Kalau tidak ada pemilu, maka dalam masyarakat bisa terjadi pertikaian untuk memperebutkan kekuasaan. Pemilu merupakan sistem lima tahunan, dimana rakyat secara langsung, bebas dan rahasia memilih wakil-wakilnya.

Ketujuh, melalui pemilu dilakukan pendidikan politik, dengan adanya siklus lima tahunan, maka partai politik diberi kesempatan untuk mendidik masyarakat dengan benar. Selain itu melalui Pemilu, masyarakat bisa langsung mempraktekkan pendidikan politik yang benar secara langsung, bebas dan rahasia. Mari kita kawal pewujudan pemilu yang berkualitas dengan berpartisipasi aktif memilih calon legislatif yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Sigit Pamungkas, SIP, MA, (Anggota Komisi Pemilihan Umum 2012-2017) dalam Seminar Nasional bertajuk

“Menyongsong Pemilu 2014 yang Berkualitas” (Sosialisasi UU No 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD)

2.2.1.1 Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Sarana memilih pejabat atau wakil rakyat
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat

Menurut Abdullah (2009) Fungsi pemilihan umum yang pokok adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui wakilnya yang terpilih.
2. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
3. Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Prinsip-prinsip pemilu menurut Amirudin dan Zaini (2006) :

1. Menjamin parlemen yang terwakili
2. Tidak terlalu rumit, sehingga pemilihan dapat dilakukan oleh rata-rata pemilih
3. Member inisiatrif untuk melakukan kerjasama antara peserta poltik
4. Menghasilkan legitimasi yang tinggi terhadap parlemen dan pemerintah.
5. Membantu membentuk pemerintahan yang stabil dan efisien.
6. Menciptakan akuntabilitas publik pemerintah dan wakil-wakil rakyat

7. Membantu pertumbuhan partai-partai politik yang mencakup berbagai macam kelompok sosial
8. Membantu menciptakan oposisi yang sehat
9. Realitas dengan keadaan financial, teknis dan administrasi negara yang bersangkutan.

Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Cara langsung, dimana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya, pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD.
2. Cara bertingkat, dimana rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya (senat), lantas wakil rakyat itulah yang memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 22E undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

2.2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat tetap artinya menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan secara mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Adapun Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
9. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya.
10. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
12. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan
15. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum dan ditahun 2014 tepatnya tanggal 09 april yang lalu Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilu hingga

sudah sebelas kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 2004, 2009 dan 2014. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1995 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung didalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan itu sendiri, dari pemilu-pemilu tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan yang sesuai untuk Indonesia.

KPU sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu, harus netral, non partisan dan mandiri dengan bersikap profesional dan independen. Kerja-kerja KPU akan diawasi banyak pihak, mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelesaian. KPU tidak hanya berurusan dengan parpol, tapi juga birokrasi pemerintah, Bawaslu, civil society, aktivis pemilu, dan kampus. KPU dituntut mampu melaksanakan pemilu secara aman, damai, dan demokratis. Jika terjadi penyimpangan akan memicu konflik dalam masyarakat.

Anggota KPU diharapkan mampu menjaga integritas dan independensinya dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga keputusan KPU dapat diterima 36 dan memiliki legitimasi yang kuat. KPU juga harus bekerja berdasarkan undang-undang yang ada, tidak boleh KPU membuat aturan yang melebihi kewenangan yang diberikan undang-undang atau yang substansinya melebihi aturan undang-undang.

2.2.3 Budaya Politik

Realitas sosial yang menggambarkan kecenderungan minimumnya partisipasi politik masyarakat yang dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya faktor yang disinyalir amat kuat pengaruhnya adalah budaya politik.

Budaya politik lahir dari budaya bangsa yang ada dalam masyarakat. Budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Budaya yang dominan di Indonesia adalah budaya patrimonialistik. Budaya patrimonialistik adalah budaya dimana pemerintah ada di bawah control seseorang dan kelompoknya, budaya ini memiliki karakteristik : (Gaffar,2004.115).

1. Kecenderungan untuk memperkuat sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya.
2. Kebijakan sering kali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistic.
3. rule of law, merupakan sesuatu yang bersifat sekunder bila di bandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (rule of man).
4. Kalangan penguasa politik sering kali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat yang kuat budaya patriarki, Patriarki sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini, laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan, sistem ini dianggap wajar

sebab pembenarannya di sejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks atau jenis kelamin bukan berdasarkan gender. (Zaenal Mukarom, 2008).

2.2.3.1 Tipe Budaya Politik

Bertalian dengan budaya politik (political culture), prof.Dr.H.Rusadi Kantaprawira, SH. mengelompokan ke dalam tiga tipe budaya politik, yaitu budaya politik parokial (parochial political culture), budaya politik kaula (subjek political culture), dan budaya politik partisipan (partisipan political culture).

Berdasarkan realita yang ada dapat dikelompokan kedalam empat tipe budaya politik yaitu: (Davies dan Lewis, 1971.115-119)

1. Budaya politik kaula, yaitu dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadara terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya.
2. Budaya politik parokial, artinya terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit misalnya yang bersipat propinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, dimana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya.
3. Budaya politik primordial, ditandai adanya ikatan-ikatan “kepentingan-kepentingan secara rasional individu atau kelompok berada atas kepentingan hidup bersama”. Dari keadaan seperti itu bisa memunculkan sekelompok-kekelompok kecil atau relatif besar pertemanan atau perhimpunan yang bisa menyampingkan kepentingan umum. Atas dasar itu menyampingkan preposionalitas, sehingga memunculkan sepoil sistem (lawan merit sistem) dalam sistem rekrutmen aparatur pemerintah/institusi.

4. Budaya politik partisipan, ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya serta dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. dengan demikian, seseorang dengan budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran, baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. oleh karena terakupnya aliran input dan aliran output, ia sendiri terlibat dalam proses politik sistem politik tertentu, betapapun kecilnya.

2.2.4 Partisipasi Pemilih

Menurut McClosky (dalam Budiardjo, 2008) partisipasi pemilih adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pemilihan, yakni mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Nelson (dalam Budiardjo, 2008) partisipasi pemilih adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

2.2.4.1 Bentuk Partisipasi Pemilih

Adapun bentuk-bentuk partisipasi pemilih menurut Irawan (dalam Efriza, 2012), yaitu:

1. Voting (pemberian suara)

Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dll.

2. Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam pemilu).

3. Aktivitas Group

Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, terror dan intimidasi, diskusi politik, dll.

4. Kontak Politik

Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik, dll.

2.2.4.2 Model Partisipasi Pemilih

Adapun model partisipasi menurut Jeffry M. Paige dalam Efriza (2012:185), antara lain:

1. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik seseorang ini cenderung aktif.

2. Partisipasi apatis, yaitu kondisi yang berlawanan dengan partisipasi aktif, dimana kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).
3. Militan (radikal), yaitu kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal.
4. Partisipasi pasif, yaitu kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

2.2.4.3 Fungsi Partisipasi Pemilih

Menurut Arbi Sanit dalam Efriza (2012:188) ada tiga fungsi partisipasi pemilih, yaitu:

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara, dan kudeta.

Disisi lain, Sudijono dalam Efriza (2012:188) memandang ada tiga fungsi partisipasi pemilih, yaitu:

1. Untuk mendorong program-program pemerintah, hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

3. Sebagai sarana untuk membuktikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

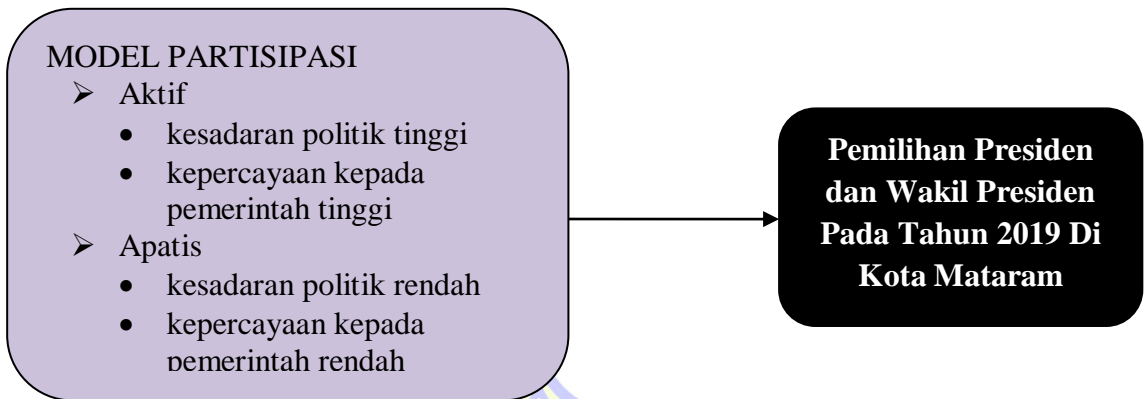
Dari penjelasan diatas terlihat bahwa fungsi partisipasi sangat penting bagi berjalannya pemerintah yang lebih baik, baik melalui pemilu maupun dari kegiatan-kegiatan lainnya.

Menurut Budiardjo (2008:367-368) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action nya, dan sebagainya.

Menurut Kenneth Boulding dalam Cangara (2011:165) orang memilih calon bukan karena ia takut apa yang akan dibuat calon kepada pemilih, atau ada harapan yang dijanjikan oleh calon, melainkan karena pemilih ingin merasa dirinya sebagai bagian daripada calon.

Disamping itu juga ada yang meyakini bahwa budaya patriarki merupakan suatu sistem yang bertingkat, yang telah dibentuk oleh suatu kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain. Pihak lain ini menurut yang meyakini definisi tersebut adalah kelompok miskin, lemah, rendah, tidak berdaya, juga lingkungan hidup dan perempuan. (Murniti, 2004.171).

2.3 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Morton R, 1971 dan Jeffry M, 2012

2.4 Definisi Konseptual

Menurut Herbet McClosky dalam Budihardjo (2008:367) partisipasi pemilih adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pemilihan, yakni mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung dan dalam proses pembentukan kebijakan umum.

2.5 Dfinisi Operasional

Model partisipasi politik masyarakat :

1. Partisipasi Aktif
 - kesadaran politik tinggi
 - kepercayaan kepada pemerintah tinggi
2. Partisipasi Apatis
 - kesadaran politik rendah
 - kepercayaan kepada pemerintah rendah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu karya ilmiah seperti paper, makalah, lebih-lebih skripsi dan disertasi sangatlah mutlak adanya dan tidaklah berlebihan. Tanpa metodologi dalam suatu kerangka karya ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak mempunyai ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar ilmiahnya.

Penelitian yang dilakukan secara ilmiah merupakan suatu cara kerja atau metode kerja yang sistematis (dilakukan secara terencana dan cermat) untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu fakta dan kesimpulan yang dapat dipahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan (Djama'an dkk, 2009 :11).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut arikunto (2010 :5), metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah Kota Mataram dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

3.3. Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut Ridwan (2008 : 69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

TABEL 3.1
Sumber Data Primer

No	Narasumber	Jenis Data	Metode	Jumlah
1.	Nelayan	Partisipasi Nelayan	Wawancara	2
2.	Wiraswasta	Partisipasi Wiraswasta	Wawancara	3
3.	Pemilih Pemula	Partisipasi Pemilih Pemula	Wawancara	3
4.	Akademisi	Partisipasi Akademisi	Wawancara	2

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literature, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proser belajar mengajar.

4.4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang di pilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto : 1998 : 34)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah :

a. Teknik observasi (pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (ridwan, 2008 : 72).

Dari pendapat ridwan diatas dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di lapangan sekaligus

mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena di lokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan (djam'an satori dan aan komariah, 2009 : 47).

Dalam penelitian ini, wawancara struktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dan pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawaban alternatif juga sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (ridwan, 2008 : 77).

Dengan teknik ini peneliti bisa mendapatkan data-data terkait dengan data-data pengawasan ombudsman pada lokasi penelitian khususnya pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota mataram

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang

terus menerus terus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (sugiyono, 2013 :243). Bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan miles dan humberman (1984) dalam sugiyono, 2013 : 246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

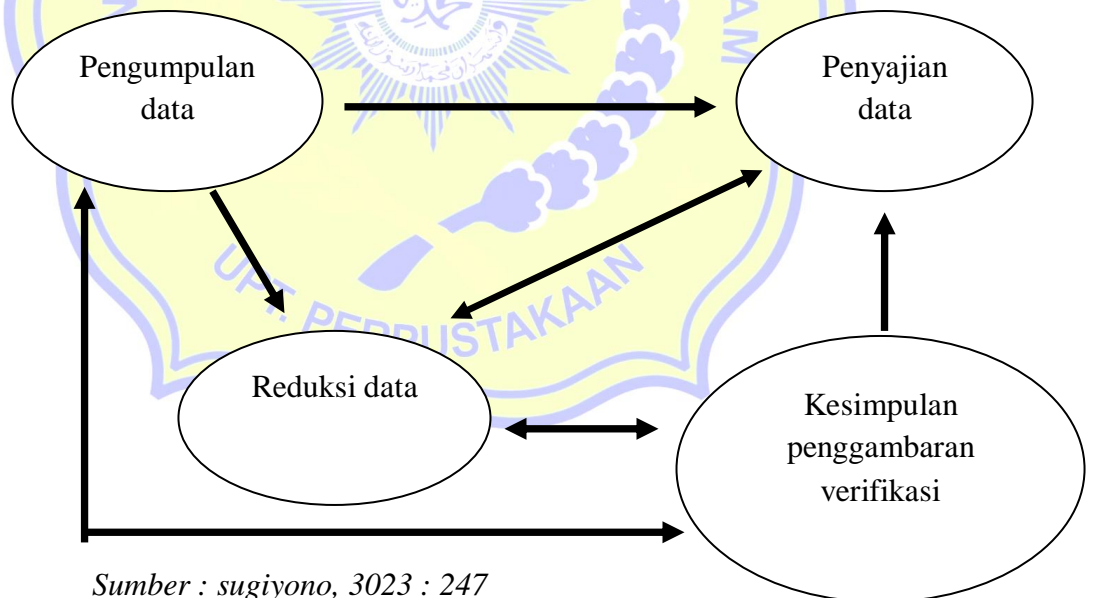
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori diagram aliran (*flowchard*) dan

sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (sugiono, 2014 : 91-99).

Untuk dapat lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan dibawah ini :



Sumber : sugiyono, 3023 : 247

Bagan 3.1 Alur Analisi Miles Dan Humberman